

Nepidatul Muspiani Khair¹
Hamdi²

Pengaruh Etika Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga

Artikel Penelitian

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelaksanaan etika birokrasi terhadap kinerja pegawai pemerintahan desa tumbuh mulia kecamatan suralaga kabupaten lombok timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 13 responden yang merupakan aparatur/pegawai pemerintahan Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh secara signifikan seperti etika birokrasi dan kinerja pegawai yang dimana dengan memperhatikan etika birokrasi terhadap kinerja pegawai dapat meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah di berikan, kurangnya pemahaman dan pengalaman terhadap nilai-nilai atau norma-norma etika birokrasi dalam memberikan pelayanan dapat menyebabkan buruknya kualitas dan membuat kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja yang di lakukan oleh aparatur pemerintah desa. Dengan adanya penerapan etika birokrasi kepada aparatur pemerintahan Desa dapat meningkat kan kualitas kinerja para pegawai pemerintahan Desa Tumbuh Mulia dan dapat lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat.

¹Fakultas Ilmu Administrasi UNW
Mataram
nepidatulmuspiani@gmail.com

²Fakultas Ilmu Administrasi UNW
Mataram
hamdikaldun@gmail.com

Kata Kunci: pengaruh, etika, birokrasi, kinerja, pegawai

PENDAHULUAN

Keberadaan Pemerintahan dan Birokrasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*. Upaya untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dapat dicapai melalui penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance*. Hal terpenting yang perlu dilakukan terkait dengan Kinerja Birokrasi Pemerintahan adalah bagaimana mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi serta bagaimana menciptakan etika birokrasi dan budaya kerja yang baik. Pada masa reformasi saat ini, kondisi birokrasi belum mengalami perubahan mendasar, masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.

Munculnya berbagai kebijakan tentang reformasi birokrasi yang dimulai tentang Etika Kehidupan Berbangsa sampai pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015. Fenomena korupsi birokrasi yang terus meningkat setelah penerapan desentralisasi menjelaskan gagalnya agenda reformasi birokrasi yang disebabkan oleh bobroknya mentalitas dan moralitas aparatur pemerintah yang menafikan Nilai-nilai etika Pemerintahan.

KKN yang dimasa Reformasi ini menjadi target utama untuk diberantas ternyata banyak bersarang dalam Struktur Birokrasi Pemerintahan. Oleh karena itu dari sinilah kemudian perlu adanya penguatan dan sentuhan etika dalam setiap Kinerja Birokrasi sehingga tujuan dari agenda Reformasi Birokrasi dapat tercapai. Selanjutnya studi ini akan diarahkan pada pentingnya sentuhan Etika dalam Reformasi Birokrasi dan bagaimana Penerapan Etika dalam setiap Kinerja Birokrasi di Indonesia. Etika dapat didefinisikan sebagai pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral yang memberikan refleksi tentang bagaimana manusia harus hidup dan bagaimana mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ini adalah artikel *Open Access* berdasarkan ketentuan *Creative Common Attribution License*, yang memungkinkan penggunaan, distribusi, dan produksi ulang dalam media apapun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.

© 2021 Penulis. Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik) diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Etika Birokrasi pada dasarnya merupakan karakter individu atau kelompok individu, dalam hal ini aparatur birokrasi secara individual atau kolektif, dalam memahami dan memperlakukan kewenangan dan tugasnya sebagai Aparatur Birokrasi.

Kinerja pegawai dalam mencerminkan pada etika birokrasi dapat mendukung terlaksananya pelayanan yang efektif, baik, dan masyarakat dapat lebih percaya terhadap kinerja pegawai Pemerintahan, bahwa setiap kinerja pegawai yang mencerminkan atau menerapkan etika yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan kenyamanan masyarakat terhadap pelayanan yang telah di berikan oleh para pegawai pemerintahan. Dengan demikian etika birokrasi menjadi masalah penting yang harus di terapkan oleh pegawai pemerintahan untuk mengurangi adanya tindakan KKN yang ada di indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh etika birokrasi terhadap kinerja pelayanan publik pegawai di Kantor Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Etika Birokrasi

Pengalaman kegagalan birokrasi menjalankan fungsinya sebagai alat bagi pencapaian tujuan negara tentu saja menjadi pengalaman buruk yang harus diperbaiki melalui agenda reformasi birokrasi. Agenda reformasi birokrasi sudah berlangsung sejak dikeluarkannya ketetapan MPR No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang dapat memberikan dasar pada Etika dalam proses kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Etika dalam kehidupan berbangsa merupakan satu wahana dalam rangka melancarkan penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara dimana dengan adanya etika yang dipahami dan menjadi dasar pola perilaku dalam berbangsa dan bernegara akan mengarah pada satu Tatanan Kenegaraan yang stabil, karena persepsi akan perilaku yang diharapkan oleh masing-masing individu sebagai warga negara dapat teramalkan dengan baik. Akan tetapi dengan adanya regulasi atau ketetapan tersebut tidak serta merta menjamin kondisi Birokrasi Indonesia saat ini menjadi lebih baik karena hal ini dipengaruhi oleh Perilaku dan Kultur Birokrasi Indonesia yang tidak menerapkan etika (Kode Etik) dalam setiap penyelenggaraan Pemerintahan.

Etika Birokrasi mempunyai dua fungsi, yaitu: Pertama, sebagai Pedoman, Acuan, referensi bagi Administrasi Negara (Birokrasi Publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi di nilai Baik, Terpuji, dan Tidak tercela. Kedua, Etika Birokrasi sebagai standar penilaian

mengenai Sifat, Perilaku, dan Tindakan Birokrasi Publik di nilai Baik, Tidak tercela dan Terpuji.

Leys berpendapat bahwa: "Seseorang Administrator dianggap Etis apabila ia Menguji dan Mempertanyakan standar-standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan, dan Tidak mendasarkan keputusannya semata- mata pada kebiasaan dan tradisi yang sudah ada".

Anderson menambahkan suatu poin baru bahwa: "Standar-standar yang digunakan sebagai dasar keputusan tersebut sedapat mungkin merefleksikan nilai-nilai dasar dari masyarakat yang dilayani".

Golembiewski mengingatkan dan menambah elemen baru yakni: "Standar Etika tersebut mungkin berubah dari waktu ke waktu dan karena itu Administrator harus mampu memahami perkembangan standar-standar perilaku tersebut dan bertindak sesuai dengan standar tersebut".

Beberapa konsep mengenai Etika Pelayanan Publik dapat disimak dari pendapat-pendapat berikut ini.

1. Etika Pelayanan Publik adalah: "Suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik" (Kumorotomo, 2000 :7).
2. Lebih lanjut dikatakan oleh Putra Fadillah (2001:27), Etika Pelayanan Publik adalah: "Suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik".
3. Sedangkan Etika dalam konteks Birokrasi menurut Dwiyanto (2002:188): "Etika Birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi Aparat Birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan Pribadi, Kelompok, dan Organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar- benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas".
4. Darwin (1999) mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi Negara) sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia organisasi. Selanjutnya dikatakan bahwa Etika (termasuk Etika Birokrasi) mempunyai dua fungsi yaitu: pertama, sebagai Pedoman, Acuan, Referensi bagi Administrasi Negara (Birokrasi Publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai Baik, Terpuji, dan Tidak tercela; kedua, Etika Birokrasi

sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan Birokrasi Publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. Seperangkat nilai dalam Etika Birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain: Efisiensi, Membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, merit system, responsible, accountable, dan responsiveness.

5. Menurut Widodo (2001), Etika Administrasi Negara adalah merupakan wujud kontrol terhadap Administrasi Negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Manakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada Etika Administrasi Negara.

Kinerja Pegawai

Suatu organisasi atau perusahaan jika ingin maju atau berkembang maka dituntut untuk memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas adalah Pegawai yang kinerjanya dapat memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk memperoleh pegawai yang memiliki kinerja baik maka diperlukan penerapan kinerja. Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan bentuknya dapat bersifat tangible (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya) atau intangible (tak dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung pada bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu.

Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi yang baik itu yang berasal dari dalam diri pegawai ataupun yang berasal dari luar individu pegawai. Mangkuprawira dan Hubeis dalam bukunya Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia (2007:153). mengatakan bahwa kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan. Kinerja adalah tingkat terhadapnya para pegawai mencapai persyaratan pekerjaan secara efisien dan efektif (Simamora, 2006).

Kinerja pegawai merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi. Kemudian Robbins (2008) mendefinisikan kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.

Mangku Prawira dan Hubeis (2007) menyebutkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi

oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik pegawai. Faktor-faktor intrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari pendidikan, pengalaman, motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi dan spiritual. Sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik, kepemimpinan, komunikasi vertical dan horizontal, kompensasi, kontrol berupa penyeliaan, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, system hukuman dan sebagainya.

Lalu Mangkunegara (2005) kinerja ialah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan Rivai (2009) kinerja diartikan kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan, dan menyempurnakannya sesuai tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan

Wibowo (2007) lebih cenderung menggunakan kata performance dalam menyebut kata kinerja. Menurutnya performance atau kinerja adalah hasil yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Moorhead dan Chung/Meggison, dalam Sugiono (2009) kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ;

1. Kualitas Pekerjaan (*Quality of Work*) Merupakan tingkat baik atau buruknya sesuatu pekerjaan yang diterima bagi seorang pegawai yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan kerapihan kerja, keterampilan dan kecakapan.
2. Kuantitas Pekerjaan (*Quantity of Work*) Merupakan seberapa besarnya beban kerja atau sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai. Diukur dari kemampuan secara kuantitatif didalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan- pekerjaan baru.
3. Pengetahuan Pekerjaan (*Job Knowledge*) Merupakan proses penempatan seorang pegawai yang sesuai dengan background pendidikan atau keahlian dalam suatu pekerjaan. Hal ini ditinjau dari kemampuan pegawai dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang mereka lakukan.
4. Kerjasama Tim (*Teamwork*) Melihat bagaimana seorang pegawai bekerja dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kerjasama tidak hanya sebatas secara vertikal ataupun kerjasama antar pegawai, tetapi kerjasama secara horizontal merupakan faktor penting dalam suatu kehidupan

organisasi yaitu dimana antar pimpinan organisasi dengan para pegawainya terjalin suatu hubungan yang kondusif dan timbal balik yang saling menguntungkan.

5. Kreatifitas (*Creativity*) Merupakan kemampuan seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan cara atau inisiatif sendiri yang dianggap mampu secara efektif dan efisien serta mampu menciptakan perubahan-perubahan baru guna perbaikan dan kemajuan organisasi.
6. Inovasi (*Inovation*) Kemampuan menciptakan perubahan-perubahan baru guna perbaikan dan kemajuan organisasi. Hal ini ditinjau dari ide-ide cemerlang dalam mengatasi permasalahan organisasi.
7. Inisiatif (*initiative*) Melingkupi beberapa aspek seperti kemampuan untuk mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi kesulitan, kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan tanpa bantuan, kemampuan untuk mengambil tahapan pertama dalam kegiatan.

METODE

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh etika birokrasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Desa tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan data yang objektif. Sedangkan kuantitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. (Sugiyono, 2018: 31).

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pelaksanaan Etika Birokrasi Terhadap Kinerja Pegawai di Pemerintahan Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif karna dalam pengolahan dan analisis tidak luput dari penerapan teknik dan metode statistik tertentu yang berhubungan dengan angka-angka, dimana kehadirannya dapat memberikan dasar dalam menjelaskan hubungan-hubungan yg terjadi antara variabel yang diteliti.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah pegawai pemerintahan Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga yang berjumlah 13 orang. Peneliti mengambil populasi di Pemerintahan Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga. Dan Aparatur pemerintahan desa tumbuh mulia yang menjadi sasaran yang merupakan subjek penelitian. Aparatur Pemerintahan Desa Tumbuh Mulia yang merasakan

bagaimana pengaruh pelaksanaan etika birokrasi disaat memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tumbuh Mulia kecamatan suralaga.

Dengan demikian sampel penelitian adalah bagian dari populasi atau wakil yang di pandang sama untuk diteliti. Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *nonprobability sampling* yaitu teknik yang tidak memberikan kesempatan /peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang untuk di pilih menjadi sampel (sampling jenuh) (Sugiyono 2018:85). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling Jenuh yang merupakan sensus, dimana semua anggota populasi di jadikan sampel.

Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas/independen (X) dan variabel Dependen/terikat (Y).

- a. Variabel Independen/Bebas (X)
Variabel Indevenden/bebas dalam penelitian ini adalah Etika Birokrasi Dipemerintahan desa Tumbuh Mulia Kecamatan suralaga
- b. Variabel Dependen/terikat (Y)
Variabel dependen/terikat dalam penelitian ini adalah Aparatur pemerintahan Desa Tumbuh mulia Kecamatan Suralaga.



Bagan 1. Variabel Independen dan Dependen

Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh pelaksanaan Etika Birokrasi terhadap kinerja pegawai pemerintahan desa mencakup kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukan serta fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diukur melalui indikator tingkat kualitas kinerja pegawai, skil yang di miliki pegawai pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik untuk meningkatkan rasa kepuasan dan kepercayaan masyarakat, sikap loyalitas, dan kerja samanya dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dipemerintahan desa Tumbuh Mulia.
- b. Kualitas kinerja pegawai yang baik adalah hasil dari penerapan prinsip-prinsip Etika Birokrasi yang dilaksanakan dengan baik yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan desa yang diukur melalui indikator masyarakat yang percaya dan puas atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan desa, dan menimbulkan ketentraman baik masyarakat dengan aparatur pemerintahan desa.

Pengumpulan Data

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksud untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrument angket atau kuesioner dengan pemberian skor sebagai berikut :

Tabel 1. Skala Likert Variabel X

Skala	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (RG)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Tabel 2. Skala Likert Variabel Y

Skala	Skor
Baik (B)	5
Cukup Baik (CB)	4
Kurang (K)	3
Tidak Baik (TB)	2
Sangat Tidak Baik (STB)	1

Selanjutnya, indikator-indikator pertanyaan dalam kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	No. Item	Jumlah
1	Etika Birokrasi	Peningkatan Kualitas pelayanan	1,2,3,4	4
		Akuntabilitas kinerja pegawai	5,6,7	3
		Peranan Pemimpin	8,9,10	3
		Disiplin kerja	11,12,13	3
		Pembinaan Karier	14,15	2
2	Kinerja Pegawai	Hubungan pegawai dengan pemimpin	16	1
		Hubungan pegawai dengan teman kerja	17,18	2
		Harapan karyawan yang di penuhi	19,20	2
		Latar belakang pendidikan formal	21	1
		Alat kerja	22,23,24,25	4
Total				25

Teknik Analisis Data

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam ini n adalah jumlah sampel.

Hasil r hitung > r tabel = valid

Hasil r hitung < r tabel = tidak valid

Jika r hitung (tiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item – total correlation*) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan

signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,60. Menurut Nunnally dalam (Ghozali, 2013) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6. Pengujian reliabilitas ini menggunakan program SPSS. 16 dengan metode Cronbach's Alpha.

Selanjutnya, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data untuk melihat apakah data-data yang di kumpulkan normal atau tidak.

TEMUAN DAN DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pelaksanaan etika birokrasi terhadap kinerja pegawai di pemerintahan desa, hambatan dalam pelaksanaan etika birokrasi terhadap kinerja pegawai pemerintahan desa, pengetahuan tentang etika birokrasi dapat meningkatkan kinerja pegawai pemerintahan desa tumbuh mulia kecamatan suralaga kabupaten lombok timur. Dengan populasi sebanyak 13 orang pegawai pemerintahan desa dengan 13 responden yang mengambil keseluruhan populasi yang ada menggunakan metode sampling jenuh.

Tabel 4. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
1.	Laki-Laki	9	69
2.	Perempuan	4	31
Total	13	100	

Sumber: Data Sekunder

Tabel 5. Karakteristik Responden berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persen
1.	20-29	3	23
2.	30-39	6	46
3.	40-49	4	31
Total	13	100	

Sumber: Data Sekunder

Tabel 6. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persen
1.	SMA	6	46
2.	S1	7	54
Total	13	100	

Sumber: Data Sekunder

Berdasarkan Keseluruhan hasil analisis data di atas maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini dapat membuktikan kebenaran pendapat yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh pelaksanaan etika birokrasi terhadap kinerja pegawai pemerintahan desa. Sebagaimana di kemukakan dalam uraian di atas Birokrasi merupakan nilai-nilai, norma-norma, atau standar-standar yang mengatur perilaku moral para aparatur birokrasi dalam melaksanakan tugas dan melakukan

tindakan jabatan. Etika birokrasi meahirkan asas etis, standar, Pedoman, dan Kebijakan moral yang luhur/baik kepada segenap aparatur pemerintahan/birokrasi. Etika birokrasi memberikan tuntunan moral terhadap aparatur tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan yang buruk; Etika dapat dianalogikan dengan sistem sensor pada tubuh manusia seperti perasaan, intuisi, dan suara hati nurani yang sering memberi teguran atau mengendalikan diri manusia. Etika birokrasi dapat juga diperjuangkan untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik atau aparatur birokrat.

Etika administrasi/birokrasi mempunyai dua fungsi, yaitu: pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi publik (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji dan tidak tercela; kedua, sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. Bahwa etika birokrasi dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena etika birokrasi memberikan atau merupakan pedoman perilaku moral bagi aparatur di dalam melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, akurat, dan berkualitas.

Pengaruh Pelaksanaan Etika Birokrasi Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan bahwa pelaksanaan etika birokrasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemerintahan desa, hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian statistik menggunakan pengujian t-tes dengan hasil t hitung (3,934) > t tabel (2,228).

Hal ini membuktikan bahwa dengan pelaksanaan etika birokrasi dapat meningkatkan kinerja pegawai pemerintahan desa, Etika birokrasi adalah nilai-nilai, norma-norma, atau aturan-aturan yang mengatur perilaku moral para aparatur birokrasi dalam melaksanakan tugas. Dengan adanya etika birokrasi yang dimiliki setiap pegawai atau aparatur pemerintahan dapat meningkatkan kualitas, kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintahan. Etika birokrasi sangat berpengaruh pada kinerja pegawai pemerintahan desa.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Etika Birokrasi Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan Desa

Dari hasil penelitian analisa pada lampiran, di dapatkan t hitung > t tabel yang diinterfrestasikan sebagai pengetahuan tentang hambatan dalam pelaksanaan etika birokrasi terhadap kinerja pegawai pemerintahan desa. Masih rendahnya komitmen dari pemimpin dalam upaya untuk melakukan pecegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, manajemen kinerja pemerintah desa belum secara maksimal, manajemen SDM belum berjalan

dengan baik, manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pemungutan liar.

Pengetahuan Tentang Etika Birokrasi Dapat Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai

Dari hasil analisa pada lampiran, didapatkan hasil t hitung > t tabel, Pengetahuan tentang etika birokrasi dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai, para aparatur lebih memahami tentang etika dalam memberikan pelayanan yang baik, dengan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan, kepuasan masyarakat, dan memberikan kenyamanan masyarakat.

Hasil penelitian diatas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan etika birokrasi terhadap kinerja pegawai/aparatur pemerintahan desa (PP No.42 tahun 2004) dalam pelaksanaan etika birokrasi terhadap kinerja pegawai di kantor desa tumbuh mulia sudah cukup baik di lihat dari beberapa indikator yang di pakai dalam penelitian ini.

Dengan demikian penelitian ini dapat menunjukkan bahwa secara teoritis dan empiris etika birokrasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemerintahan desa. Makin tinggi/baik pemahaman, penghayatan, dan pengalaman aparatur terhadap etika birokrasi, semakin tinggi/baik pula kinerja pegawai pemerintahan desa. Dengan demikian, etika birokrasi dapat di gunakan untuk memprediksi perkembangan kinerja pegawai pemerintahan desa pada birokrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah di uraikan di atas, maka dapatlah di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari indikator yang di pakai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya kinerja pegawai pemerintahan desa di sebabkan antara lain kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengalaman pegawai pemerintahan desa terhadap nilai-nilai atau norma-norma etika birokrasi.
2. Dilihat dari indikator yang dipakai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika birokrasi mempunyai pengaruh yang sangat nyata terhadap kinerja pegawai pemerintahan desa di desa tumbuh mulia kecamatan suralaga kabupaten lombok timur.
3. Dari hasil uji hipotesis telah dilakukan dengan menggunakan rumus uji t memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya pelaksanaan etika birokrasi terhadap kinerja pegawai pemerintahan desa tumbuh mulia kecamatan suralaga dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kinerja pegawai pemerintahan desa tumbuh mulia kecamatan suralaga, karena dengan adanya nilai etika birokrasi

dapat memberikan kinerja pegawai yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa tumbuh mulia, maka dapat dikatakan bahwa etika birokrasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pemerintahan desa tumbuh mulia kecamatan suralaga.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, hasil penemuan dalam maka dapatlah dikemukakan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman, penghayatan dan pengalaman pegawai terhadap etika birokrasi perlu di tingkatkan agar kinerja pegawai pemerintahan menjadi lebih baik kedepannya, untuk itu pembinaan tentang etika birokrasi kepada pegawai pemerintahan desa harus di lakukan secara intensif.
2. Kinerja pegawai pemerintahan desa perlu di tingkatkan di desa tumbuh mulia antara lain melalui penerapan etika birokrasi dengan sungguh- sungguh oleh semua aparatur.
3. Penerapan etika birokrasi oleh pegawai perlu keteladanan dari para pemimpin atau elit birokrasi itu sendiri. Untuk itu perlu komitmen dari pemimpin untuk menerapkan etika birokrasi dengan baik dan benar.
4. Bagi pemerintah untuk lebih bersatu, serta selangkah, seayun, dan sekata dan memberikan dukungan terhadap para pegawai sehingga lebih optimal dalam menjalankan fungsinya atau tugasnya dalam melayani masyarakat.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2016. Manajemen Penelitian. Jakarta. PT RINEKA CIPTA
- Aryani, Lina. 2017. Penguatan Etika Dalam Birokrasi di Indonesia.
- Karawang Ghazali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi VII. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Kumorotomo, Wahyudi. 2018. Etika Administrasi Negari. Jakarta. PT BUMI AKSARA.
- Mario, MC. A. Salindeho. 2012. Implementasi Etika Pemerintahan dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerinta. Jakarta
- Nawari Hadari & Martini Mimi, 1994, Penelitian Tarapan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Podungge, Robiyati, 2014, Mewujudkan Birokrasi Yang Mengedepankan Etika Pelayanan Publik, Surabaya

Ratminto & Septi, 2018, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, ALFABETA, Bandung

Sinambela, Lijan Poltak, 2008, Reformasi Pelayanan Publik, PT. BUMI AKSARA, Jakarta

Soemantri, Trisantono, Bambang, 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, FOKUSMEDIA, Bandung

Wibowo SE, 2016, Manajemen Kinerja, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Winardi & Sirajuddin (2015). Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Stara Press. Jakarta Timur

Zen Zulfikar, 2010. Etika Kepustawanan. CV. Sagung Seto. Jakarta